

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. TWI selaku nadzir DDR ialah pihak yang menghimpun donasi wakaf baik benda bergerak maupun tidak untuk kemudian mengalokasikannya kedalam bentuk properti antara lain : rumah sewa, ruko, kios, sarana olahraga, perkebunan, sekolah
2. Dilihat dari cara pengelolaan wakaf, TWI telah melakukan manajemen wakaf dengan cara professional. Hal ini merujuk pada beberapa indikator seperti (1) benda wakaf dikelola secara produktif sehingga menghasilkan surplus (2) perawatan benda wakaf dan gaji nadzir tidak menjadi beban lembaga dikarenakan berasal dari surplus yakni 40% perawatan dan investasi dan 10% gaji nadzir (3) surplus yang dihasilkan mampu menjadi sumber dana bagi pembangunan sarana sosial setelah digabung dengan donasi zakat, infaq dan sedekah yakni sebesar 50%.
3. Pengelolaan sarana sosial dari wakaf baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi diserahkan kepada DD sebagai organisasi induk dan sebagai amil dalam hal ini.
4. Belum adanya SOP baku bagi setiap staff hingga hilangnya beberapa aspek dalam fungsi manajemen seperti ketiadaan pedoman terkait *reward dan punishment* dikarenakan lingkungan kerja yang bersifat kekeluargaan.

5. Terpusatnya pengelolaan wakaf produktif menjadikan pengelolaan wakaf sulit untuk menjangkau seluruh wilayah nusantara.

Adapun problematika dan kendala yang sering dihadapi pihak TWI baik dalam penghimpunan donasi wakaf maupun pengelolaanya diantaranya:

1. Masih banyaknya jumlah donatur yang berwakaf sekali waktu dan belum memahami konsep wakaf tunai yang menjadi salah satu program TWI
2. Adanya SDM yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan sulit untuk diajak mengembangkan organisasi.
3. Kadangkala petugas TWI mendapatkan sambutan yang tidak baik dari masyarakat dikarenakan ketidakpahaman masyarakat akan konsep wakaf produktif
4. Lokasi harta wakaf yang sulit dijangkau sehingga sulit pemantauannya.
5. Birokrasi pemerintah yang berbelit-belit dan kebiasaan suap yang sering ditemui khususnya dalam hal pengajuan izin bangunan maupun usaha.
6. Jumlah SDM yang sangat sedikit yakni 3 orang yang kesulitan dalam mengurusinya banyak aset.
7. Program tidak berjalan karena dana yang dianggarkan tidak mampu dipenuhi oleh bidang *fundraising*, hal ini sangat dipahami karena poros utama pengembangan aset selain dari 40% surplus juga dari himpunan donasi wakaf pada periode berikutnya
8. Aset wakaf yang sulit diberdayakan dikarenakan lokasi dan tunggakan pajak ataupun ketiadaan sertifikat menambah beban tugas yang sudah ada.

Sedangkan solusi yang selama ini dijalankan dalam mengatasi kendala diatas adalah :

1. Langkah yang dilakukan dalam mengatasi masalah donatur yang berwakaf hanya sekali waktu serta ketidakpahaman masyarakat akan wakaf produktif yaitu dengan mengenalkan konsep wakaf produktif dalam berbagai kesempatan dan media.
2. Kurang optimalnya SDM diatasi dengan pengadaan pelatihan secara berkala.
3. Lokasi harta wakaf yang terpencar saat ini diatasi dengan menunjuk mitra-mitra binaan TWI dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan wakaf di daerah tersebut.
4. Birokrasi yang berbelit-belit dimimalisir dengan melobi kalangan pemerintah juga dengan ikut serta dalam beberapa program kemanusiaan pemerintah sehingga TWI lebih dikenal.
5. Jumlah SDM yang sangat sedikit saat ini disiasati dengan pembagian wewenang masing-masing staf yang cukup besar sehingga koordinasi yang dilakukan bukan lagi top-down melainkan bottom-up.
6. Penyusunan prioritas program untuk mengantisipasi penghimpunan dana yang tidak mencapai target.
7. Aset wakaf yang sulit untuk diberdayakan akan dijual dan disatukan dengan donasi wakaf tunai.

5.2. Saran

1. Diharapkan pemerintah dalam hal ini diawali dengan pemerintah daerah untuk mendukung semaksimal mungkin dalam mengenalkan konsep wakaf produktif

pada masyarakat dan hendaknya bagi nadzir dalam hal ini TWI bersama dengan DDR selain mensosialisasikan wakaf produktif pada masyarakat juga terhadap pemerintah, dengan harapan kendala birokrasi dapat diminimalisir dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berasal dari surplus wakaf mampu lebih berkembang dan selaras dengan program pemerintah.

2. Bagi TWI selaku nadzir hendaknya rencana untuk pembentukan nadzir disetiap wilayah disegerakan mengingat DDR sebagai organisasi induk juga telah memiliki perwakilan disetiap wilayah. Hal ini dengan harapan potensi wakaf disetiap wilayah dapat tergarap secara maksimal serta pengelolaan dapat dilakukan langsung disetiap wilayah, dan akan berimbas pada surplus yang lebih besar sehingga pemberdayaan masyarakat akan terjadi pada setiap wilayah TWI.
3. Hendaknya pula agar dilakukan penambahan portofolio baik itu berupa pabrikasi dengan cara akuisisi maupun pemberdayaan industri kecil ataupun dalam hal surat berharga seperti obligasi dan saham syariah yang termasuk kedalam saham bluechip, hal ini dikarenakan cepatnya pertumbuhan nilai surat berharga sebagaimana properti yaitu bagi hasil obligasi yang mencapai 8-9% pertahun sedangkan saham mengalami pertumbuhan 16-19% pertahun, Selain itu juga melihat tingkat aman yang dimiliki dari dua tipe surat berharga tadi.
4. Lingkungan kekeluargaan dalam kerja sangat perlu dijaga, akan tetapi penggunaan SOP yang baku harus tetap ada sehingga fungsi manajemen akan mampu dijalankan seutuhnya.
5. Ketiadaan koordinasi rutin bagi banyak bagian dikhawatirkan kedepannya dapat berakibat yang kurang baik, maka disarankan hendaknya program apel pagi yang

pernah dijalankan tetap mampu berjalan sebagai ganti dari koordinasi rutin baik itu secara kelembagaan maupun setiap bidang.

6. Bagi TWI juga hendaknya mensosialisasikan sistem yang sudah dijalankan pada lembaga ZISWAF lainnya, dikarenakan sistem terkait manajemen wakaf produktif masih bersifat perlembaga dan masih menjadi sebuah masalah bagi lembaga-lembaga yang ingin mengelola wakaf secara produktif. Hal ini dengan harapan kedepannya pengelolaan wakaf produktif mampu berdampak secara nasional sebagaimana yang terjadi di Bangladesh, Kuwait dan Turki. Langkah ini dapat diawali dengan menggandeng beberapa lembaga ZISWAF yang menjadi mitra DDR

7. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengkaji pengelolaan wakaf produktif dari segi kesehatan dan kemampuan lembaga baik itu melalui beberapa analisis dan rasio yang biasa digunakan oleh perusahaan publik untuk menilai kinerja perusahaan setiap tahunnya. Hal ini dengan harapan TWI selaku pioneer dalam pengelolaan wakaf produktif mampu lebih berkembang dan professional.

Selain itu peneliti selanjutnya juga memungkinkan meneliti dampak pemberdayaan ekonomi melalui sekolah gratis, rumah sakit dan lain2 dari hasil surplus wakaf produktif.